PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

ANGGA SAPUTRA

(*e-mail* : angga.saputra71@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. ZAILI RUSLI, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Action is an important step to do, given the problems of Metropolitan city located on undisciplined in the traffic and the traffic jams and road transport. The city of Pekanbaru, leading metropolitan cities certainly have to take a stand, so that the problems occurred in the city's metropolitan doesn't happen anyway in the city of Pekanbaru. The action performed by Satlantas Polresta together Dishubkominfo Pekanbaru has not felt up to due to the still large number of cases of violations and traffic accidents and congestion that occurred. The purpose of this research is to know how the implementation of curbing traffic and road transport performed by Satlantas Polresta together Dishubkominfo Pekanbaru and to determine the factors that influence the implementation of curbing traffic and road transport in the city of Pekanbaru.

The concept of the theory of management and use is the author of management oversight. This research uses qualitative research methods to the study of descriptive data. In data collection, the author uses interview techniques, observation and documentation. With the use of key informants as a source of information and technique of triangulation as a source in the validity of the data.

The results of this research indicate that curbing traffic and road transport in the city of Pekanbaru were done by Satlantas Polresta and Dishubkominfo the city of Pekanbaru, yet feels maximum, evidenced from the still high number of violations and accidents that occur each year, weak internal surveillance officers in the field, so there are still officers who commit irregularities for personal gain. The factors that inhibit the action of traffic and road transport in the city of Pekanbaru is the number of officers who conduct surveillance system, still less the budget hasn't been right on target as well as lack of knowledge and awareness of good and safe driving.

Keywords: Curbing, traffic and Road Transport

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai kota yang mengarah kepada kota metropolitan dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, tentu

akan menambah jumlah penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan alat transportasi yang aman dan nyaman untuk melintasi berbagai wilayah. Alat transportasi yang biasanya

dikenal dengan kendaraan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik manusia maupun barang. Sedangkan angkutan pribadi adalah angkutan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi, baik manusia maupun barang contohnya adalah mobil dan sepeda motor.

Sesuai dengan visi misi kota Pekanbaru saat ini adalah mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Untuk menuju menjadi kota metropolitan pemerintah kota Pekanbaru harus lebih tanggap dengan melakukan tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang biasa terjadi di kota metropolitan yaitu salah satunya adalah kemacetan. Tertib lalu lintas tentu saja harus dilakukan, karena tertib lalu lintas salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kemacetan yang menciptakan kesemerawutan kota. Tertib lalu lintas akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melintasi jalan-jalan di kota Pekanbaru. Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (dalam masyarakat); atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah keadilan. Jadi dapat diartikan ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai (*Prof.Dr.S.Gautama*).

Keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan raya untuk menghindari resiko terjadinya kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Seorang pengendara kendaraan bermotor tentu harus memiliki kematangan fisik dan mental untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengendara yang tidak memenuhi kualifikasi dalam berkendara tentu tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Permasalahan transportasi yang terjadi dalam perkotaan tersebut antara lain berupa penertiban arus lalu lintas, penentuan jenis moda kendaraan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan parkir, dan perambuan lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan menjadi hal yang dianggap wajar bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur dan mengurus masalah lalu lintas angkutan jalan raya, dibentuk Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagai implementer kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan raya di daerah dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa : *“Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan raya dan pembinaannya*

dilaksanakan oleh Pemerintah.”

Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam lalu lintas yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pembinaan lalu lintas, namun tetap saja hal itu masih dirasakan belum maksimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelanggaran yang terjadi didalam berlalu lintas. Perencanaan dan pengaturan dibidang lalu lintas terasa tidak efektif dan efisien bagi pengendara, seperti terlalu jauhnya tempat untuk berbalik arah, rambu-rambu yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengendara dan penjalan kaki, dan masalah lalu lintas lainnya.

Pengendalian dan pengawasan juga terasa belum maksimal. Beberapa titik rawan pelanggaran lalu lintas sering kali tidak mendapatkan pengawasan. Hal ini tentu berpotensi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan terjadinya kecelakaan. Kemudian, pengemudi angkutan umum bahkan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi yang khusus untuk angkutan umum. Banyaknya angkutan pribadi dan angkutan umum yang parkir disembarang tempat, pelanggaran yang terjadi terhadap marka jalan, dan peraturan jalan raya lainnya. menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	RATA-RATA /HARI
1.	2010	38.883	107
2.	2011	47.821	131
3.	2012	44.709	122
4.	2013	34.551	95
5.	2014	28.206	93
TOTAL		190.573	

Sumber : Satuan Polisi Lalu Lintas

Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi yang berhasil diamankan/ditertibkan oleh Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tingginya pelanggaran lalu lintas di kota Pekanbaru melebihi 30.000 pelanggaran setiap tahunnya, atau rata-rata mencapai 100 pelanggaran setiap harinya. Penurunan angka pelanggaran dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Tingginya angka pelanggaran ini akan berdampak pada kesemerawutan, kemacetan, atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengguna jalan. Hal ini membuktikan bahwa masih lemahnya tingkat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Pelanggaran terjadi sebagian kecil dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengetahui peraturan berlalu lintas, namun pada umumnya sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang sudah menyadari dan mengetahui peraturan lalu lintas tersebut. Pelanggaran dilakukan dipandang hanya untuk mempermudah mereka, dibandingkan dengan mengikuti aturan lalu lintas yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien bagi kepentingan mereka tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan pengguna

jalan raya lainnya. Pelanggaran tersebut tentu berpotensi terjadinya kecelakaan seperti melawan arus, menggunakan trotoar sebagai jalur lintas dalam berkendara, padahal trotoar merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pejalan kaki. Hal ini tentu sangat membahayakan pejalan kaki dan bertentangan dengan aturan yang dibuat pemerintah kota Pekanbaru yaitu dalam Peraturan daerah No. 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 130 yang berbunyi *“Dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan pejalan kaki dan/ atau pemakai jalan lainnya”* dan sangat rawan terjadi kecelakaan dan tindakan kriminal. Beberapa kondisi berlalu lintas yang dianggap tidak efektif dan efisien bagi masyarakat misalnya terlalu jauh tempat berbalik arah, rambu-rambu dan marka jalan yang membuat pengendara berputar terlalu jauh, dan *traffic light* yang terlalu lama.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor bukan hanya sekedar peraturan berlalu lintas, ataupun rambu-rambu lalu lintas melainkan pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan keselamatan diri pengguna kendaraan bermotor seperti kendaran bermotor roda 2 (dua) diwajibkan menggunakan helm dan pengguna kendaraan bermotor roda 4 (empat) wajib menggunakan sabuk pengaman atau *safety belt*. Selain itu, ketidaklengkapan kendaraan bermotor juga dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor, seperti kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan kaca spion, tidak ada

lampu rem, sein dan lampu penerangan. Meskipun pelanggaran yang dilakukan berpotensi besar terjadi kecelakaan atau membahayakan keselamatan jiwa, namun masih saja banyak yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi dilakukan setiap waktu dalam berkendara. Tidak tertibnya pengendara kendaraan bermotor akan menimbulkan dampak atau akibat seperti kecelakaan, kemacetan, dan sangat membahayakan bagi diri pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lainnya. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang baik untuk mengendalikan berbagai situasi dalam berlalu lintas demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas di kota Pekanbaru. Ketidaktertiban dalam berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan yang merugikan masyarakat, jumlah kecelakaan yang terjadi kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			Kerugian Materil
			Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
1.	2010	320	49	39	390	Rp.633.151.000
2.	2011	291	66	20	317	Rp.596.000.000
3.	2012	442	110	88	527	Rp.829.150.000
4.	2013	272	92	84	239	Rp.735.950.000
5.	2014	312	65	65	319	Rp.650.450.000
TOTAL		1.637	382	296	1.792	Rp.3.297.601.000

2010-2014

Sumber : Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, angka kecelakaan yang terjadi di kota Pekanbaru masih tergolong tinggi. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi pengguna jalan yang mengharapkan kondisi jalan yang tertib aman, dan nyaman. Walaupun upaya-upaya dalam menertibkan lalu lintas

dan angkutan jalan sudah dilakukan oleh pihak yang berwenang, tetapi masih saja terjadi pelanggaran dan berujung pada kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian materil yang dapat mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang yang mengalami kecelakaan tersebut. Kecelakaan pada dasarnya di sebabkan oleh 4(empat) faktor, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, kompatibilitas antara manusia dan kendaraan (*Human Machine compatibility*) dan faktor lingkungan jalan. Dari keempat faktor tersebut, maka faktor manusia menjadi faktor yang paling sering dalam menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun masalah yang dapat mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran marka/rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor masih banyak terjadi di kota Pekanbaru seperti melawan arus dan berkendara diatas trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
2. Pelanggaran kelengkapan administrasi (SIM, STNK, dll), tidak memakai perlengkapan berkendara, kondisi kendaraan yang tidak layak untuk beroperasi, pengendara ugal-ugalan dan lain sebagainya.
3. Masih banyaknya kendaraan bermotor yang parkir disembarang tempat dan parkir ditempat yang dilarang untuk parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Anak dibawah umur masih banyak yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya Kota Pekanbaru dan tingginya kecelakaan yang

disebabkan oleh anak dibawah umur tersebut.

5. Adanya pedagang kaki lima menggunakan ruas jalan raya di kota Pekanbaru sebagai tempat berjualan, sehingga hal ini menimbulkan kemacetan, kesemerawutan, bahkan kecelakaan.
6. Keberadaan pengemis di persimpangan jalan raya di kota Pekanbaru dapat menimbulkan kemacetan bahkan berpotensi terjadinya kecelakaan. Hal ini tentu sangat merugikan pengguna jalan dan pengemis tersebut.
7. Sarana dan prasarana juga menjadi faktor terjadinya kecelakaan, hal ini dapat dilihat masih banyak kondisi ruas jalan raya di kota Pekanbaru dalam keadaan rusak, berlubang, tergenang air/banjir, dan bergelombang. Kondisi jalan raya yang rusak dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan raya.

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif dan teritegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya yang didasarkan pada pembagia kerja, tugas dan tanggung jawab. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang terdiri dari beberapa fungsi serta memiliki tujuan yang ingin dicapai **Brantas (2009:2).**

2. Pengawasan

Winardi (2006:395) pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Menurut **Bohari (1992:4)** pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud semula.

Menurut **Bohari (1992:4)** Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan :

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai
- d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus di laksanakan

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu

tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan itu telah mengikuti kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan, pengawasan represif ini biasanya dilakukan dalam bentuk :

- a. Pengawasan jauh
- b. Pengawasan dekat

3. Pengendalian

Menurut **Knoontz dalam Sri Wiludjeng (2007:176)** "*controlling is the measurement and corection performance in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them being accomplished*".

Dapat disimpulkan pengendalian merupakan proses untuk memastikan apa yang telah direncanakan sesuai perencanaan. Dan jika terjadi penyimpangan, maka hal yang perlu segera dilakukan adalah pengambilan tindakan koreksi untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi.

4. Manajemen Transportasi

Menurut **Miro (2005:5)** transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena dalam pengertian diatas terdapat kata-kata usaha, berarti transportasi juga merupakan sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari

keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Alat pendukung apa yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut, dan alih ini, bisa bervariasi, tergantung pada : 1) bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut, 2) jarak antara suatu tempat ke tempat lain, 3) maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya pada kantor Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Kota Pekanbaru dan kantor Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Pekanbaru, yang diberi wewenang dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kota Pekanbaru.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah – masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, Baik melalui observasi

maupun wawancara. Data primer ini diperoleh dari :

1. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah penelitian Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kota Pekanbaru.
 2. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada kawasan padat lalu lintas, dan kawasan rawan pelanggaran.
- b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data berupa dokumen tentang Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Kota Pekanbaru dan buku-buku yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yakni teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dengan obojek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian. Observasi ini dilakukan dibeberapa kawasan tertib lalu lintas dan kawasan yang dikategorikan rawan pelanggaran.

b. Wawancara

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan *key* informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan Dinas, Bidang, dan orang-orang tertentu yang terkait dengan

penelitian, seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (**Sugiyono:2009**). Dokumentasi disini berbentuk foto-foto mengenai permasalahan tentang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya dilakukan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan raya di kota Pekanbaru demi terciptanya situasi yang kondusif, aman, tertib, tenteram dalam berlalu lintas sebab apabila sistem transportasi aman, tertib, lancar dan terkendali maka akan sejalan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk menjamin agar penertiban dapat berhasil, diperlukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif serta berbagai indikator didalamnya. Kemudian Menurut **Bohari (1992:25)** pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya

wujud semula. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan itu telah mengikuti kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan

Mengenai penertiban ini tentu saja tidak terlepas dari hal pengawasan yang harus diketahui, adapun beberapa aspek yang terkait diantaranya yaitu :

1. Siapa yang melakukan pengawasan tersebut
2. Siapa yang harus diawasi oleh pengawas
3. Apa pedoman dan standar yang digunakan dalam pengawasan
4. Kapan dilakukan pengawasan
5. Dimana dilakukan pengawasan
6. Bagaimana melakukan pengawasan tersebut

Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilakukan dengan cara memonitor untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang terjadi, agar tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penertiban berarti tindakan korektif dari pengawasan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Agar lebih jelas mengenai Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di kota Pekanbaru, maka penulis akan menguraikan secara rinci indikatornya. Adapun indikator dari Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di kota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah :

1. Pengawasan Preventif Prosedur

a. Pemberian Pedoman Pengawasan

Pemberian Pedoman adalah suatu prosedur atau petunjuk yang digunakan bagi pihak yang berwenang dalam melakukan tugasnya, dalam hal ini Penertiban Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang ditertibkan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru.

b. Sosialisasi Masyarakat

Kegiatan Sosialisasi merupakan langkah utama dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan itu diimplementasikan. Kegiatan Sosialisasi mengenai cara berlalu lintas yang baik dan benar serta aturan-aturan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.

c. Pembagian Tugas

Melakukan pengawasan tentu saja harus ada pembagian tugas yang jelas, agar semua instansi yang terlibat pada proses penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru dapat bekerja sama dengan baik. Pembagian tugas pengawasan dalam upaya penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, yakni melibatkan Satlantas Polresta dan Dishubkominfo kota Pekanbaru.

d. Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan pedoman pengawasan yang dilakukan yaitu diatur berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang dikenakan yakni berupa teguran, tilang dan denda dengan jumlah uang denda ditetapkan dalam pedoman pengawasan.

2. Pengawasan Represif/Langsung

Pengawasan represif dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan yang telah terjadi dengan yang seharusnya terjadi, sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan penyimpangan atau kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pada penelitian ini penulis memandang permasalahan tentang penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru dengan beberapa aspek yang menjadi penilaian yaitu wawancara dan observasi di lokus penelitian. Adapun indikator penilaian meliputi pengawasan langsung, Pengawasan berkala yang telah direncanakan, tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dishubkominfo kota Pekanbaru dan sanksi berupa teguran dan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut.

a. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala dilakukan, sesuai dengan pedoman yang ada yaitu peraturan perundang-undangan, yakni

melakukan razia rutin 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.

b. Penertiban/teguran

Tindakan penertiban adalah wujud dari proses pengawasan yang dilakukan, penertiban dilakukan disaat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat. Untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas melalui proses yang panjang pula, dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Langkah penertiban harus segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor dalam kegiatan berlalu lintas. Untuk itu tindakan penertiban masuk kedalam teori pengawasan represif. Artinya penertiban dilakukan setelah suatu pengawasan secara preventif dilakukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Pekanbaru penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.

c. Sanksi

Tindakan penertiban dengan menerapkan sanksi tegas terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi akan menimbulkan efek jera bagi pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran. Sanksi sangat penting dilakukan, agar peraturan yang berlaku dapat ditegakkan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sanksi diberikan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tentu tidak

terlepas dari pedoman Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu lintas dan angkutan jalan Tepatnya diatur pada bagian keempat, paragraf pertama, tentang ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dan perlengkapan kendaraan bermotor, pasal 57 (1), Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia. (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan
- b. ban cadangan
- c. segitiga pengaman
- d. dongkrak
- e. pembuka roda
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah
- g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas

pasal 105 mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib, mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan. Pasal 106 (4) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas

- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal
- h. Tata cara pengendalian dan penempelan kendaraan lain

Kemudian pada pasal 106 (5) mengatur bahwa pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang wajib menunjukkan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b. Surat Izin Mengemudi
- c. Bukti lulus uji berkala
- d. Tanda bukti lain yang sah

Pasal 106 (6), mengatur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

Pasal 106 (8), setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 107 (1), mengatur penggunaan lampu utama, yaitu pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 menjadi standar Satlantas Polresta Pekanbaru dalam melakukan penertiban lalu lintas serta angkutan jalan raya di kota Pekanbaru. Dalam undang-undang ini diatur secara rinci aturan-aturan yang harus ditaati

dalam berlalu lintas guna terhindarnya pengguna jalan. Penjabaran tentang Lalu lintas diatas merupakan dasar Satlantas bersama Dishubkominfo kota Pekanbaru menerapkan sanksi tegas yaitu berupa tilang atau denda.

A. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi.

Jumlah Personil Satlantas Polresta Pekanbaru belum sebanding dengan luas daerah yang diawasi. Hal ini berarti Satlantas Polresta Pekanbaru mengalami kekurangan personil. Sehingga pengawasan, penjagaan, pengaturan, dan patroli tentu tidak efektif dan efisien. Hasil yang didapat juga tidak maksimal dikarenakan proses pengawasan mengalami hambatan sumber daya manusia. Setiap organisasi atau instansi memiliki hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah vital apabila suatu organisasi atau instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya atau tidak sebanding personil yang bertugas dengan jumlah pekerjaan yang dikerjakan akan memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan

kurang baik atau kurang maksimal. Penambahan akan personil amat dibutuhkan ketika personil dalam proses pengawasan tidak memadai dengan tugas yang dikerjakannya.

Kemudian, permasalahan yang dapat menghambat proses pengawasan serta penertiban yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru adalah ketidaktahuan akan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta kurangnya kesadaran akan perilaku tertib berlalu lintas. Kemudian, orang tua yang seharusnya membantu mengontrol anaknya yang masih dibawah umur agar tidak lagi membawa kendaraan bermotor. Karena perilaku pelanggaran yang saat ini terjadi banyak di dominasi oleh pelajar.

Dari segi Biaya, operasi rutin atau razia rutin yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru tidak didukung oleh pembiayaan yang baik. Kondisi ini tentu membuat proses pengawasan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, masih ada personil yang berusaha untuk melakukan pungutan liar, agar kebutuhan akan makan atau minum pada saat razia dapat terpenuhi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru, Pengawasan Preventif, yaitu : pemberian pedoman pengawasan, sosialisasi masyarakat, pembagian tugas,

dan penetapan sanksi. Pengawasan represif yaitu pengawasan langsung, berkala, penertiban/teguran dan sanksi sebagai berikut :

1. Penertiban Lalu Lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru terhadap pengguna kendaraan bermotor tidak tegas dalam memberikan sanksi. Pengguna kendaraan bermotor yang sudah ditangkap dan dikenakan sanksi masih saja melakukan pelanggaran yang sama. Dapat ditarik kesimpulan efek jera yang diharapkan dari diberlakukannya sanksi belum begitu terasa bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Selain itu, biaya operasional dalam melakukan razia rutin tidak ada, sehingga masih ada beberapa personil Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan pungutan liar pada saat di lapangan.
2. Untuk penertiban angkutan jalan yang dilakukan oleh Dishubkominfo tidak tegas dalam memberikan sanksi. Kebijakan yang mengatur penahanan kendaraan yang selama 21 hari dan kemudian disidangkan dengan membayar denda, setelah itu kendaraan dibebaskan. Proses ini tidak membuat pengusaha angkutan jalan baik angkutan umum maupun barang jera. Setelah dilepaskan kembali seperti biasa melakukan pelanggaran kembali.
3. Faktor yang menjadi penghambat dari proses pengawasan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta

Pekanbaru bersama Dishubkominfo adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi dengan cakupan luas daerah yang diawasi. Pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah personil Satlantas Polresta Pekanbaru bersama Dishubkominfo dalam melakukan pengawasan. Banyak pihak belum mendukung tugas kepolisian dalam melakukan penertiban lalu lintas, seperti untuk kasus pengendara dibawah umur, orang tua tidak melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor walaupun belum cukup umur.

4. Dalam kegiatan penertiban harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi jalan yang baik, penerangan serta rambu dan marka jalan yang baik pula kemudian manajemen transportasi masal yang tidak baik, yang tidak memaksimalkan penggunaan angkutan umum untuk mengurangi kesemerawutan, kemacetan bahkan kecelakaan.
5. Kurangnya pengetahuan akan berlalu lintas dan angkutan jalan oleh masyarakat dirasakan menjadi hambatan dalam mewujudkan kondisi tertib berlalu lintas. Dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pengendara yang tidak menggunakan alat kelengkapan kendaraan, alat keselamatan, tidak memiliki bukti administrasi yang sah, angkutan jalan bertonase berat masih banyak yang masuk ke dalam kota Pekanbaru, parkir

disembarang tempat masih terjadi, dan angkutan umum yang tidak layak lagi untuk dioperasikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sanksi terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran harus di pertegas sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem pengawasan internal dari pimpinan terhadap bawahan harus diperbaiki. Agar tidak terjadi lagi pungutan liar yang dilakukan oleh personil untuk kepentingan pribadinya, karena dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian, perlu dievaluasi kembali sistem penganggaran dana Satlantas Polresta Pekanbaru, agar dana yang ada dapat diserap secara efektif dan efisien.
2. Walikota dan DPRD kota Pekanbaru harus melakukan revisi Peraturan Daerah Tentang Angkutan Jalan, agar angkutan yang sudah dilakukan penahanan tidak mudah untuk dibebaskan dan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut.
3. Satlantas Polresta dan Dishubkominfo kota Pekanbaru harus lebih cermat dan teliti dalam merekrut personil, agar personil yang bertugas memang berkompeten dibidangnya dan seimbang jumlah personil dengan

- luas daerah yang diawasinya. Memaksimalkan penggunaan teknologi, seperti cctv, agar proses pengawaasan dapat berjalan dengan baik.
4. Untuk meningkatkan efektivitas lembaga yang mengelola transportasi perlu dilakukan reorganisasi Dinas Perhubungan dengan mengasimilasikan Sub Dinas Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Pekanbaru ke dalam Dinas Perhubungan. Hal ini bertujuan agar Dinas Perhubungan menjadi Dinas yang secara utuh dalam mengelola transportasi beserta sarana dan prasarananya.
 5. Satlantas Polresta dan Dishubkominfo harus mampu memberikan sosialisasi yang menyeluruh dan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar pengetahuan masyarakat akan tertib berlalu lintas, serta kesadaran masyarakat akan lalu lintas dan angkutan jalan timbul, sehingga terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Amirullah, Budiyo, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta :PT Raja Grafindo

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Penerbit Alfabet
- Fahmi Irfan. 2012. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. cetakan pertama. Bandung :Alfabeta
- Gautama, Sudargo. 1987. *Hukum Perdata Internasional*. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni
- Handoko, T.Hani. 1998. *Manajer Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Gunung Agung
- Harahap, Syafri, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Quantum
- Hasibuan, H. Melayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE
- H.B, Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kamaludin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi KarakteristikTeori dan Kebijakan*, Jakarta
- Khisty, C. Jootin, B. Kent Lall.2006. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Edisi 2*. Jakarta : Erlangga
- Manullang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta : Erlangga

Mochtar, Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni

Salim, Abbas. 2006. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintah Daerah*. Jakarta : Katahasta Pustaka

Sugiyono. 2005. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara

_____. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Wiludjeng, Sri SP. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Winardi, 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti

_____. 2006. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT Reneka Cipta

Skripsi :

Purwati, Dewi. 2014. *Pengawasan Pengemudi Sepeda Motor Di bawah Umur Oleh Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru*, Skripsi : Pekanbaru

Tabroni, Muhammad. 2012. *Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, Skripsi : Pekanbaru

Dokumen :

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah

Website :

<http://www.swarariau.com/2014/10/pertib-kan-kendaraan-parkir-di-area-ktl/> diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

<http://satlantasrestapku.blogspot.com/p/sat-lantas-laksanakan-penertiban-parkir.html> diakses pada tanggal 8 Oktober 2014

http://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas diakses pada 20 Oktober 2104

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/01/02/sehari-2-nyawa-melayang-di-jalan-raya-riau> diakses pada 20 Oktober 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota Pekanbaru](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru)